

Nama : Fransiskus Setianto

NPM : 2213031005

Kelas : 22c

### UAS AKUNTANSI PERPAJAKAN

Jawaban :

1. Diketahui :

- Tuan Caknan melakukan jasa perawatan mesin pemotong rumput kepada PT Ambyarjaya dengan imbalan diterima Rp. 28.000.000
- upah yang dibayarkan kepada pekerja Rp. 11.250.000
- Biaya Sparepart Rp. 5.550.000

Ditanya :

Berapa PPh Pasal 21 yang terhutang ?

Jawab :

Untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terhutang kita perlu menentukan penghasilan neto yang diterima oleh Tuan Caknan dan dikurangi biaya yang dikeluarkan

→ Penghasilan Bruto (Pendapatan Kotor)

penghasilan bruto : Rp. 28.000.000

biaya yang dikurangkan : Upah pekerja : Rp. 11.250.000

biaya Sparepart : Rp. 5.550.000 +  
Total biaya : Rp. 16.800.000

↳ Penghasilan Neto (penghasilan kena pajak)

$\text{Penghasilan Neto} = \text{Penghasilan bruto} - \text{Total biaya}$

$$\begin{aligned}\text{Penghasilan Neto} &= \text{Rp. } 28.000.000 - \text{Rp. } 16.800.000 \\ &= \text{Rp. } 11.200.000\end{aligned}$$

↳ Tarif Pph Pasal 21

Menurut Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia tarif pph pasal 21 untuk penghasilan tidak tetap

Jika penghasilan Neto kurang dari Rp. 50.000.000 = 5%

Karena penghasilan Neto yang terhitung Rp. 11.200.000 maka tarif yang berlaku 5%

↳ Pph Pasal 21 Terhitung

$$\begin{aligned}\text{Pph pasal 21 terhitung} &= 5\% \times \text{Penghasilan Neto} \\ &= 5\% \times \text{Rp. } 11.200.000 \\ &= \text{Rp. } 560.000\end{aligned}$$

Jadi Pph pasal 21 yang terhitung oleh tuan Caknan atas jasa perawatan mesin pemotong rumput kepada PT Ambayar Jaya adalah Rp. 560.000.

2. Diketahui :

Bendahara Pengeluaran dinas Pertanian Kabupaten A pada 10 Juli 2016 melakukan pembayaran atas pembelian alat tulis kantor dari toko Kuning senilai Rp 2.100.000 (termasuk PPN 10%) pembayaran dilakukan dengan uang persediaan ditanya :

hitunglah pph pasal 21 ?

Jawab:

Nilai pembelian barang + PPN Rp. 2.100.000

DPP (100/110) x Rp 2.100.000 Rp. 1.909.091

Pembayaran tersebut tidak dikenakan pph pasal 21 karena nilainya kurang dari Rp. 2.000.000

Menurut PMK-59/PMK.03/2022

Batasan belanja tidak dipungut pph pasal 21 atas belanja barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah (Selain bendahara Bos) adalah pph pasal 21 tidak dipungut oleh bendahara atau instansi pemerintah dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2000.000 termasuk pph dan pembayaran yang tidak terpecah

3. Jika Pt Cundasari memiliki omset 7,5 milyar, berapa angsuran pph 25 yang dibayarkan

Jawab:

→ Menentukan tarif pph badan

Tarif pph untuk badan tahun 2024 yaitu 22%

→ Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Misalkan laba kena pajak 10% maka:

PKP:  $10\% \times 7,5 \text{ M} = 0,1 \times 7.500.000.000 = \text{Rp } 750.000.000$

→ Menghitung Pajak terhutang

Pph terhutang:  $22\% \times 750.000.000 = 0,22 \times 750.000.000$

= Rp 165.000.000

↳ Menghitung Angsuran pph pasal 25

Angsuran pph dibayarkan Setiap bulan maka:

$$\text{Angsuran pph 25} = \frac{\text{Pph terutang}}{12}$$

$$= \frac{165.000.000}{12}$$

$$= \text{Rp. } 13.750.000$$

Dengan asumsi laba kena pajak 10% dari omzet & tarif pph badan adalah 22% maka pph pasal 25 yang harus dibayarkan pt Cundasari ialah Rp 13.750.000